

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara memiliki pendapatan yang salah satunya bersumber dari pajak, dimana pada berbagai negara, pajak digunakan sebagai sumber dana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mala & Ardiyanto, 2021). Terlebih bagi negara berkembang, pajak memiliki peran yang sangat krusial dimana negara sangat memiliki ketergantungan pada penerimaan pajak negara (Bana & Ghazali, 2021). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang sangat memiliki ketergantungan dengan pajak sebagai sumber dana bagi negara. Hal ini ditunjukkan melalui data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa pada tahun 2022, pendapatan negarasebesar 2,6 triliun dengan 2 triliunnya didapatkan melalui penerimaan pajak (Keuangan, 2023).

Meskipun pajak menjadi sumber dana penerimaan terbesar yang dibutuhkan oleh negara, pajak merupakan suatu pengeluaran yang relatif signifikan bagi perusahaan. Pengeluaran untuk membayar pajak dapat menurunkan laba setelah pajak, tingkat *return*, dan arus kas sehingga perusahaan akan berupaya melakukan pengelolaan dalam perpajakan agar jumlah pembayaran pajaknya dapat diminimalisasi. Upaya yang dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang akan dibayar dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak secara legal, ilegal, dan di antaranya (*grey area*) yang

dilakukan manajemen untuk mengurangi pendapatan kena pajak. tindakan meminimalkan jumlah pembayaran pajak secara ilegal disebut sebagai penggelapan pajak (*Btax evasion*) sedangkan tindakan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak secara legal disebut sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Bana & Ghozali, 2021).

Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah-celah atau *loopholes* dalam peraturan perpajakan. Aktivitas agresivitas pajak merupakan aktivitas yang umum dalam bisnis secara global. Tiga perusahaan besar yaitu Google, Facebook, dan Microsoft melakukan tindakan penghindaran pajak yang nilainya mencapai Rp 41 triliun per tahun di berbagai negara dengan memanfaatkan celah-celah pada sistem perpajakan global dan salah satunya di Indonesia, dan pemeriksaan tidak menemukan adanya bukti pelanggaran perpajakan oleh ketiga perusahaan tersebut. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak negara dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan rasio pajak, yaitu rasio penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Menurut laporan Bank Dunia, rasio pajak Indonesia tahun 2019 rasio pajak Indonesia termasuk rendah diantara negara-negara berkembang lainnya, yaitu sebesar 10,2% (Bana & Ghozali, 2021).

Guna mengawasi jalannya operasional perusahaan, dewan komisaris memiliki peran krusial guna dapat memberikan nasihat yang terkait dengan pengelolaan perusahaan oleh direksi dimana dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris dituntut untuk dapat memastikan perencanaan dan manajemen sumber daya yang efektif. Dewan perusahaan bertanggung jawab atas keputusan

perusahaan besar, dan efektivitas keputusan tersebut bergantung pada karakteristik dewan. Dewasa ini, para pemangku kepentingan lebih menekankan pada keragaman gender dalam jajaran direksi perusahaan. Ide tersebut telah menarik perhatian dunia atas dasar pandangan bahwa dengan menambahkan direktur yang beragam dapat meningkatkan kinerja dewan (Mustafa *et al.*, 2020).

Keragaman gender di dewan perusahaan tidak hanya mengarah pada proses keputusan yang efektif tetapi juga tata kelola yang baik, yang membantu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Secara luas, keragaman sehubungan dengan gender dipandang sebagai dasar yang signifikan untuk keuntungan ekonomi organisasi dan nilainya semakin diakui oleh para pemangku kepentingan (Mustafa *et al.*, 2020). Banyak negara di dunia telah mewajibkan organisasi mereka menunjuk seorang wanita untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Laporan Deloitte tentang *Women on Boards* di tahun 2019 seperti yang termaktub dalam Mustafa *et al.*, (2020) berdasarkan data dalam laporan Delloite, wanita saat ini memegang 16,9% kursi dewan internasional, yang meningkat 1,9% dibandingkan tahun 2017. Sehubungan dengan laporan penelitian dari Asosiasi Ilmu Psikologi, ditemukan bahwa wanita jumlahnya dua kali lipat (34%) di negara-negara di mana ada kuota untuk pengangkatan perempuan di dewan, serta hukuman berat dalam kasus ketidakpatuhan dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki peraturan apa pun untuk penunjukan perempuan (18%), dimana dalam kasus negara maju, rasio ini meningkat dari 5% menjadi 12% antara tahun 2001 dan 2012 (Mustafa *et al.*, 2020).

Keragaman gender telah menarik perhatian yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk praktisi, akademisi, dan media. Representasi perempuan di ruang dewan meningkatkan fakta bahwa banyak negara telah mempromosikan perwakilan perempuan di dewan direksi atau mewajibkan perusahaan untuk merekrut setidaknya satu direktur perempuan (Tania, 2022). Keanekaragaman gender dewan di dalam perusahaan mempromosikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja perusahaan, dimana dengan memiliki lebih banyak wanita di dewan perusahaan maka akan memicu adanya kepemilikan budaya perusahaan yang lebih baik dan perusahaan dipandang lebih etis. Sementara banyak perusahaan mengalami tantangan retensi dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kumpulan talenta perempuan terus berkembang. Semakin banyak wanita yang lulus dari universitas. Di Indonesia, persentase perempuan yang lulus dari universitas meningkat dari 16% pada tahun 1993 menjadi 59% pada tahun 2018. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, lulusan universitas memiliki persentase perempuan sebesar 51% (Tania, 2022).

Meskipun begitu, perusahaan masih merekrut lebih banyak pria untuk menempati posisi pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dapat memberikan peluang yang lebih signifikan untuk pengembangan profesional dan promosi bagi pria, sedangkan perempuan diberikan posisi yang dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan karir mereka. Indonesia merupakan negara yang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan pada level manajemen, dimana isu kritisnya adalah apakah keragaman gender dalam dewan direksi dapat mendorong kinerja perusahaan di Indonesia. Di

Indonesia, munculnya segregasi pekerjaan berasosiasi dengan stereotype tentang perempuan dan laki-laki atau dengan kata lain, terdapat struktur hierarkis dan patriarki yang menggambarkan bahwa laki-laki lebih berkompeten dibandingkan perempuan. Sulit bagi perempuan untuk mencapai posisi manajemen tingkat atas dibandingkan laki-laki (Tania, 2022)

Bertentangan dengan pernyataan tersebut, *International Labour Organization* dalam Tania (2022), perusahaan dengan perempuan sebagai CEO perusahaannya di Asia Pasifik terbukti memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya mengikutsertakan laki-laki. Adanya stereotip terhadap perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh langsung terhadap promosi keragaman gender. Permasalahan yang ada dapat muncul dari tahap perekrutan tenaga kerja dan diskriminasi yang tidak disadari terhadap perempuan sehingga menimbulkan pandangan bahwa perempuan tidak cocok untuk peran tertentu. Stereotip ini juga mencegah perempuan untuk dipromosikan, sehingga seringkali ditemukan bahwa kemampuan perempuan untuk mendapatkan keuntungan profesional terbatas dibandingkan laki-laki, padahal kemampuannya sama (Tania, 2022).

Perusahaan dengan keragaman gender di dewan mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik karena perempuan membawa perubahan signifikan dalam sumber daya manusia dan bisnis (Hoseini & Gerayli, 2018). Masalah perempuan di dewan perusahaan dapat dianggap baik secara sosial maupun ekonomi, dimana secara sosial, seperti laki-laki, perempuan juga berhak menduduki peran manajerial dan lebih lanjut, wawasan ekonomi juga mengharuskan organisasi untuk memilih

individu yang memenuhi syarat untuk posisi manajerial terlepas dari jenis kelamin mereka. Di sisi lain, kebijakan pajak perusahaan seperti penghindaran pajak berdampak negatif pada kinerja pemerintah. Namun, pembayar pajak, khususnya perusahaan memiliki kepercayaan bahwa pajak merupakan beban tanggung jawab baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan (Hoseini & Gerayli, 2018).

Menurut teori tanggung jawab sosial, karena masyarakat mengizinkan perusahaan untuk melanjutkan operasinya, mereka menganggap diri mereka berkomitmen pada masyarakatnya, sehingga cenderung membayar pajak atas kompensasi tersebut. Perusahaan-perusahaan ini percaya bahwa membayar pajak merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Mengikuti teori keagenan, di sisi lain, pemilik sebagian besar fokus pada kekayaan dan kepentingan perusahaan di bawah kendali mereka, sehingga menghindari pembayaran pajak. Upaya yang dilakukan untuk membuat keseimbangan antara dua vena dalam sistem tata kelola perusahaan telah menghasilkan penekanan yang semakin meningkat pada peran direktur perempuan di dewan perusahaan karena perempuan diyakini lebih efektif dalam memantau proses membuat keseimbangan antara pemegang saham dan kepentingan masyarakat dibandingkan laki-laki (Hoseini & Gerayli, 2018).

Berdasarkan pemaparan latar belakang, isu dan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik serupa yakni terkait dengan direksi wanita dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Secara khusus pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan dan hubungannya dengan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Lebih lanjut,

penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa peraturan terkait APA yang terbaru, diperbarui pada tahun 2020. Perusahaan multinasional secara khusus sektor manufaktur, dipilih oleh peneliti mengingat sektor manufaktur memiliki skala yang besar dengan sub-sektor yang beragam sehingga dapat dilakukan perbandingan antara perusahaan satu dan lainnya, selain itu perusahaan sektor manufaktur memiliki nilai saham yang lebih stabil meskipun sedang berada pada masa krisis mengingat pada akhir tahun 2019 dan awal 2020 terjadi krisis yang melanda seluruh dunia akibat COVID-19 apabila dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya, dimana hal ini disebabkan oleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur secara umum tetap dibutuhkan sehingga kemungkinan kerugian yang dialami kecil. Maka, judul dari penelitian yang akan diteliti adalah **“Feminisme CEO dan Pengaruhnya Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka berikut rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio direksi wanita terhadap karakteristik perusahaan *risk averse* dan *risk taker*?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio direksi wanita pada perusahaan yang berukuran besar dan kecil?
3. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap karakteristik pengambilan risiko?

4. Apakah terdapat pengaruh dari feminisme CEO dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui *transfer pricing*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui dan menganalisa perbandingan perbedaan rasio direksi wanita terhadap karakteristik perusahaan *risk averse* dan *risk taker*.
2. Mengetahui dan menganalisa perbandingan perbedaan rasio direksi wanita pada perusahaan yang berukuran besar dan kecil.
3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap karakteristik pengambilan risiko.
4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh dari karakteristik demografi dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam memperluas literatur akuntansi secara khusus dalam topik yang dibahas, terkait dengan direksi wanita dan pengaruhnya terhadap ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan dan *transfer pricing*. Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan dapat mengetahui keterkaitan antara direksi wanita dan



pengambilan keputusan di dalam fenomena yang terjadi yakni kepatuhan pajak perusahaan multinasional sektor manufaktur.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi serta tindakan lebih lanjut bagi perusahaan untuk dapat menilai tingkat efektivitas dari direksi wanita, ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan serta hubungannya dalam penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan pandangan mengenai direksi wanita dan pengaruhnya terhadap ukuran dan karakteristik perusahaan serta kaitannya dalam penghindaran pajak.